

PERAN KUNCI DAN INSPIRASI “SANG PUTRI SEJATI”: ANALISIS WACANA KRITIS ATAS SURAT-SURAT KARTINI ¹

P. Ari Subagyo

Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta
ari130267@yahoo.com

Abstrak

R.A. Kartini dijuluki “pendekar bangsa, pendekar kaumnya untuk merdeka”. Kepahlawanan Kartini secara formal diakui melalui Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia (Ir. Soekarno). Namun, kepahlawanan Kartini disangsikan oleh sejumlah pihak dalam media sosial. Kesangsian itu menunjukkan bahwa kepahlawanan Kartini tidak/kurang dipahami oleh masyarakat Indonesia. Apa sesungguhnya peran kunci dan inspirasi dari seorang Kartini? Melalui analisis wacana kritis (AWK) atas kehidupan Kartini sebagai teks, terungkap bahwa peran kunci Kartini dalam konteks zamannya adalah keberaniannya memperjuangkan emansipasi, mendobrak kekolotan adat, dan menentang penjajahan. Adapun lewat AWK atas surat-suratnya, terlacak bahwa Kartini menawarkan inspirasi mengenai (1) visi kebangsaan, (2) vitalnya pendidikan, (3) pentingnya membaca dan menulis, (4) sikap kritis dan berani, (5) kesederhanaan dan kerendahan hati, (6) keselarasan dalam keluarga, serta (7) kepercayaan diri membangun relasi. Melalui surat-suratnya yang analitis dan menyentuh, Kartini tampil mewujudkan kepemimpinan wacana (*discursive leadership*) bagi kaum hawa dan bangsanya.

Kata kunci: peran kunci, inspirasi, surat Kartini, struktur makro, kepemimpinan wacana

Abstract

R.A. Kartini is called as “pendekar bangsa, pendekar kaumnya untuk merdeka (nation heroin, her gender heroin to free)”. Kartini’s heroism was formally acknowledged through the Indonesian Presidential Decision Letter (Ir. Soekarno). However, Kartini’s heroism is doubted by some sides in the social media. That doubt shows that Kartini’s heroism is not or less understood by Indonesians. What is actually the key part and inspiration from a Kartini? Through critical discourse analysis (CDA) on Kartini’s life as a text, it is revealed that Kartini’s key part in the context of her era is her bravery to fight emansipation, break through the old-fashioned cultural norms, and fight against coloniser. Through CDA on her letters, it is found out that Kartini offered inspiration on (1) nation

vision, (2) the vital of education, (3) the importance of reading and writing, (4) critical and brave attitude, (5) modesty and generosity, (6) harmony in family, and (7) confidence in building relation. Through her analytical and touching letters, Kartini comes forward to create discursive leadership for the females and her nation.

Keywords: *key part, inspiration, Kartini's letters, macrostructure, discursive leadership*

1. PENGANTAR

R.A. Kartini yang lahir di Jepara (21 April 1879) dan wafat di Rembang (17 September 1904) telah tercatat sebagai pahlawan nasional dalam album sejarah bangsa Indonesia. Kepahlawanannya secara formal diakui melalui Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 108, tanggal 2 Mei 1964. Komponis-pejuang W.R. Soepratman mencatat kepahlawanan Kartini dalam syair lagu "Ibu Kita Kartini": "Ibu kita Kartini putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Ibu kita Kartini pendekar bangsa, pendekar kaumnya untuk merdeka. Wahai ibu kita Kartini, putri yang mulia. Sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia". Kata-kata kunci yang dilekatkan W.R. Soepratman pada sosok Kartini ialah "putri sejati", "harum namanya", "pendekar bangsa", "pendekar kaumnya untuk merdeka", "putri yang mulia", dan "sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia". Di mata W.R. Soepratman, jasa dan sumbangan Kartini tidak hanya berguna bagi kaum hawa, tetapi lebih luas juga bagi bangsa Indonesia.

Namun, selain pengakuan, mengemuka pula kontroversi tentang Kartini. Sekadar contoh, dalam laman tentang Kartini di www.wikipedia.com, dipersoalkan mengapa tanggal lahirnya dijadikan sebagai Hari Kartini. Jika esensinya untuk menghargai peran kaum perempuan, mengapa peringatan tidak disatukan dengan Hari Ibu, 22 Desember? Apalagi Kartini wafat pada usia relatif muda (24 tahun 5 bulan). Apa yang mampu dilakukan seorang perempuan pribumi yang belum genap 25 tahun di zaman penjajahan? Kartini juga tidak pernah memanggul senjata melawan penjajah. Wilayah perjuangannya hanya sebatas Jepara dan Rembang. Sikap Kartini yang akhirnya rela dimadu (dipoligami) pun bertentangan dengan pandangan kaum feminis tentang emansipasi kaum wanita. Diragukan pula kebenaran surat-surat Kartini yang dicurigai sebagai buah rekayasa J.H. Abendanon. Kecurigaan timbul karena surat-surat itu terbit di saat pemerintah kolonial Belanda menjalankan politik etis dan Abendanon termasuk pejabat yang mendukung dan berkepentingan dengan keberhasilan politik etis. Bahasa Belanda dalam surat-surat itu pun begitu bagus, tetapi hingga sekarang sebagian besar naskah asli surat-surat Kartini tidak diketahui keberadaannya. Keturunan Abendanon pun sulit dilacak tempat tinggalnya.

Kesangsian atas kepahlawanan Kartini telah mencuat ketika gelar Pahlawan Nasional hendak disematkan pada putri Bupati Jepara ini. Sejumlah pihak menolaknya. Namun, Presiden Soekarno dengan tegas menerbitkan SK No. 108, tanggal 2 Mei 1964 yang menetapkan Kartini sebagai pahlawan nasional, dan tanggal lahirnya diperingati setiap tahun sebagai Hari Kartini. SK tersebut telah berumur setengah abad, tetapi keraguan atas kepeloporan Kartini ternyata masih saja mengemuka, sebagaimana terungkap dalam beberapa media sosial. Jika jasa Kartini telah diakui, masyarakat Indonesia sebenarnya minim pemahaman. Tengok bagaimana masyarakat merayakan Hari Kartini. Anak-anak sekolah dari tingkat taman kanak-kanak hingga para pegawai kantor mengenakan pakaian daerah. Apakah langkah itu menyentuh esensi kepahlawanan Kartini dan mampu menghidupkan

spiritnya di tengah dinamika zaman?

Mengingat kesangsian dan kekurangpahaman itu, dalam artikel ini akan dijawab dua pertanyaan. Pertama, apa sesungguhnya peran kunci Kartini? Kedua, apa saja inspirasi yang dapat digali dari surat-surat Kartini? Jawaban atas dua pertanyaan itu diungkap dengan menganalisis secara kritis kehidupan Kartini sebagai teks dan topik-topik yang diangkat Kartini dalam surat-suratnya.

2. TEORI DAN METODE

Sejak berusia dua puluhan tahun, Kartini rajin menulis surat kepada teman-teman Eropanya, baik yang bermukim di Hindia Belanda (Nusantara) maupun di Belanda. Setelah Kartini wafat pada usia kurang dari 25 tahun, 17 September 1904, surat-surat itu dikumpulkan dan dibukukan oleh Mr. J.H. Abendanon, Direktur Pendidikan “Etis” pertama di Hindia Belanda, sebagai bentuk penghormatan pribadinya kepada Kartini (Ricklefs, 2005: 331). Buku itu terbit pada 1911 dengan judul *Door Duisternis tot Licht* yang arti harfiahnya “Dari Kegelapan Menuju Cahaya” dan dicetak ulang beberapa kali. Pada 1922, Balai Pustaka menerbitkannya dalam bahasa Melayu dengan judul *Habis Gelap Terbitlah Terang: Boeah Pikiran*. Kemudian tahun 1938, terbit *Habis Gelap Terbitlah Terang* versi sastrawan Pujangga Baru Armijn Pane. Versi ini sempat dicetak sebelas kali. Tahun 1979, Djambatan menerbitkan terjemahan Sulastin Sutrisno dalam bahasa Indonesia berjudul *Surat-surat Kartini: Renungan tentang dan untuk Bangsanya*. Surat-surat Kartini juga diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa dan Sunda. Adapun terjemahan ke dalam bahasa Inggris dilakukan Joost Coté dengan judul *Letters from Kartini: An Indonesian Feminist 1900-1904*. Joost Coté juga menulis buku *Aku Mau ... Feminisme dan Nasionalisme: Surat-surat Kartini kepada Stella Zehandelaar 1899-1903*. Kiprah Kartini pun menginspirasi lagu “Ibu Kita Kartini” karya W.R. Soepratman, biografi *Panggil Aku Kartini Saja* karya Pramoedya Ananta Toer (1962), dan film “Kartini” (1983). Pembacaan ini menggunakan buku *Surat-surat Kartini: Renungan tentang dan untuk Bangsanya* terjemahan Sulastin Sutrisno (penerbit Djambatan, 1979).

Pembacaan atas surat-surat Kartini ini dilakukan dengan analisis wacana kritis (AWK) model kognisi sosial yang ditawarkan T.A. van Dijk. Dalam pandangan van Dijk (2003: 85-107; 2005: 71-95; 2006: 97-118), terdapat tiga-segi wacana-kognisi-masyarakat (*discourse-cognition-society triangle*). Wacana (*discourse*) mencakup ‘peristiwa komunikatif’ (*‘communicative event’*) dalam arti luas, yang meliputi percakapan interaktif, teks tertulis, gestur, mimiek wajah, tata letak tipografis, gambar, serta tanda-tanda semiotis dan multimedia apa pun. Kognisi (*cognition*) berupa pengetahuan (*knowledge*), keyakinan (*beliefs*), tujuan (*goals*), penilaian (*evaluation*), perasaan (*emotion*), dan struktur ‘ingatan’ dan ‘mental’ lain apa pun (*any other ‘mental’ or ‘memory’ structures*) yang bersifat personal sekaligus sosial, yang tercakup dalam wacana dan komunikasi. Adapun masyarakat (*society*) adalah kelompok, relasi kelompok yang di dalamnya terdapat dominasi dan ketimpangan, gerakan, lembaga, organisasi, proses sosial, sistem politik, serta aneka perangkat sosial-budaya yang lebih abstrak dan bersifat lokal, nasional, ataupun global.

Wacana dan masyarakat berhubungan erat, tetapi hubungan itu bersifat tidak langsung. Hubungan antara wacana dan masyarakat diantarai oleh kognisi. Jika wacana berupa teks dan masyarakat sebagai konteks yang melingkupinya, untuk memahami teks dalam konteks, kognisi harus dipahami terlebih dahulu. Kognisi merupakan entitas yang bersifat atau bersisi mental sekaligus sosial. Kognisi menjadi penting karena mengawali

produksi (pembuatan) ataupun reproduksi (pemahaman) atas sebuah wacana. Kognisi yang bersifat mental sekaligus sosial itu terepresentasi dalam wacana, mulai dari struktur makro hingga struktur mikro. Dalam artikel ini, hanya akan dilacak representasi kognisi dalam struktur makro, yaitu topik surat-surat Kartini.

Topik adalah perihal yang dibicarakan dalam wacana (Poedjosoedarmo dikutip Baryadi 2002: 54). Topik merupakan informasi embrional dan informasi inti yang menjadi pangkal inspirasi pembuat wacana (Baryadi, 2002: 55). Dalam pandangan van Dijk, topik mencerminkan struktur makro semantis (*semantic macrostructure*) atau makna global (*global meaning*) wacana sehingga topik mengendalikan berbagai aspek dalam wacana. Topik juga berdimensi sosial karena menunjukkan pengetahuan atas dunia (*knowledge of the world*) ataupun keterikatan pembuat wacana dengan lingkungan sosial atau masyarakatnya. Dengan demikian, jika dipandang dengan kacamata AWK model kognisi sosial van Dijk, surat-surat Kartini memuat pergulatan pemikiran (kognisi) sang penulis sebagai respons atas situasi sosial yang dihadapi masyarakatnya. Pergulatan pemikiran Kartini terungkap lewat topik-topik yang dipilih dan diulas dalam surat-suratnya. Melalui topik-topik itulah Kartini menggali dan menebar inspirasi bagi kaum perempuan ataupun warga bangsanya.

AWK model kognisi sosial diawali dengan mengidentifikasi *clue* (tanda, isyarat) (bdk. Titscher, dkk. 2000). *Clue* untuk melacak jawaban atas pertanyaan yang telah diajukan berupa aneka satuan kebahasaan, mulai dari pernyataan berwujud paragraf, gugus kalimat atau gugus tuturan, kalimat atau tuturan tunggal, frasa, hingga kata. Berbagai *clue* itu kemudian ditafsirkan dan dipaparkan sesuai dengan konteksnya.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Peran Kunci Kartini

Mengapa Presiden Soekarno menerbitkan SK No. 108, tanggal 2 Mei 1964 untuk mengangkat Kartini sebagai pahlawan nasional? Keputusan itu agaknya didasari hasil pembacaan Soekarno atas Kartini beserta kehidupannya sebagai teks. Tekstualitas Kartini beserta perjalanan hidupnya membawa pada rekonstruksi peran kunci Kartini dalam tiga hal, yaitu berani memperjuangkan emansipasi wanita, mendobrak kekolotan adat, dan menyerang kolonialisme yang menjadi sumber derita umat manusia (bdk. Siregar, 1964: 22; Ricklefs, 2005: 331). Peran kunci dalam tiga perkara yang dilakukan Kartini sangat mungkin terasa biasa-biasa bagi para perempuan zaman sekarang. Namun, tiga hal itu sungguh istimewa dan unik jika ditempatkan dalam konteks sejarah akhir abad ke-19.

Kartini dan kaum perempuan (Jawa) sebayanya menghadapi aturan adat yang memasung. Adat mengharuskan mereka tidak bersekolah, menjalani kawin paksa, dan poligami. Hal yang sama terjadi di kalangan bangsawan. Bahkan, perempuan bangsawan yang memasuki usia 12 tahun —termasuk Kartini— harus dipingit, menunggu laki-laki datang melamar. Mereka wajib menerima perjodohan yang diatur keluarga, bahkan menerima laki-laki pilihan orang tua yang sudah beranak-isteri. Para priyayi umumnya memilih laki-laki yang sederajat untuk anak gadis mereka. Alih-alih mempertimbangkan kejiwaan kaum perempuan, perjodohan antarkalangan elite Jawa dilandasi kepentingan untuk mempertahankan kemurnian “darah biru”, status sosial, dan agar harta kekayaan tetap berada di tangan mereka. Akibat berbagai kungkungan itu, kaum perempuan (Jawa)

menjadi terbelakang dan selalu ditempatkan di bawah kuasa laki-laki. Mereka sekadar menjadi *kanca wingking* (teman di belakang) yang identik dengan urusan “3 –ur”: dapur, sumur, kasur (memasak, mencuci, melayani hasrat suami) atau perkara “3 –ak”: *masak, macak, manak* (memasak, bersolek, melahirkan).

Kartini berani mendobrak adat yang membelenggu itu. Ia ingin kaum wanita maju maka harus diberi kesempatan bersekolah, bekerja, dan memilih pasangan hidupnya sendiri. Selain melalui surat-surat yang analitis dan menyentuh, Kartini mewujudkan cita-citanya secara nyata dengan membekali para perempuan di sekitar rumah ayahnya keterampilan memasak, menjahit, membaca, menulis, dan berhitung. Melalui pembekalan semacam itu, Kartini sesungguhnya juga memperjuangkan emansipasi (kesetaraan hak) kaum wanita. Perjuangan Kartini bahkan tidak sebatas menegakkan emansipasi dan mendobrak adat. Cakrawala kesadaran menerobos lebih jauh dan luas. Pikiran dan hati Sang Putri Sejati terusik pula oleh nasib bangsanya yang terjajah. Oleh karena itu, Kartini lewat surat-suratnya juga meneriakkan ajakan merdeka kepada bangsanya.

Petikan surat Kartini kepada Ny. M.C.E. Ovink-Soer di bawah ini secara sekilas memperlihatkan kepeloporan Kartini dalam memperjuangkan emansipasi, melawan adat, dan bermimpi tentang Jawa Baru atau Jawa masa depan yang merdeka dari penjajahan:

“Bukan orang laki-laki yang kami lawan, melainkan pendapat kolot yang turun-temurun, adat yang tidak terpakai lagi bagi tanah Jawa kami masa depan. Dari Jawa Baru ini beberapa orang lain, baik laki-laki maupun perempuan, bersama-sama kami merupakan pelopor” (*Surat-surat Kartini: Renungan tentang dan untuk Bangsaanya*, 1979: 41).

Apa yang dilakukan Kartini menunjukkan keberanian luar biasa sekaligus tampak unik. Luar biasa dan unik terutama karena ia memilih berjuang dengan tulisan, modus yang mustahil dapat dilakukan oleh perempuan sebayanya pada masa itu. Kartini memilih berjuang dengan tulisan sebab ia memiliki modal pengetahuan dan keterdidikan. Maklum, ia puteri R.M.A.A. Sasraningrat yang dikenal sebagai salah satu bupati di Jawa yang paling maju pada zamannya (Ricklefs, 2005: 331) sehingga Kartini lebih maju dalam pendidikan dibanding perempuan pribumi (Jawa) sebayanya. Hingga berusia 12 tahun, ia dibolehkan bersekolah sampai tingkat Europese Lagereschool (ELS). Di ELS ini Kartini belajar bahasa Belanda dengan sangat bersemangat demi menyetarakan diri dengan kaum penjajah. Sayangnya, ketika Kartini meminta izin melanjutkan ke Hoogere Burgerschool (HBS) Semarang, seperti saudara prianya, sang ayah tidak mengizinkan. Meskipun demikian, bekal pendidikan di ELS dan kemampuan berbahasa Belanda telah membuat Kartini berpikiran maju sehingga berani unik dan “tampil beda” dibandingkan perempuan sezamannya.

Apalagi Kartini ditakdirkan lahir di Mayong, Jepara, bukan di Yogyakarta atau Surakarta. Jepara yang terletak di wilayah pantai utara Jawa lebih terbuka terhadap pengaruh budaya luar daripada Yogyakarta dan Surakarta sebagai pusat budaya Jawa. Dapat dimaklumi jika perempuan berpikiran maju yang berani menentang adat justru berasal dari Jepara, tidak dari Yogyakarta ataupun Surakarta. Para perempuan di pusat kekuasaan dan budaya Jawa pasti lebih tunduk pada adat.

Penting dicatat bahwa keterdidikan Kartini mendapat dukungan zaman dan keluarga. Tahun 1870-1900 menjadi periode liberal akibat kemenangan oposisi di parlemen Belanda. Selain menghentikan kebijakan *cultuurstelsel* di Hindia Belanda yang berlangsung sejak

1830-an, liberalisme di parlemen Belanda telah menghadirkan simpati atas buruknya kesejahteraan kaum pribumi. Memang baru 1901 Kerajaan Belanda menerapkan politik etis di Hindia Belanda. Namun, sejak 1891 sekolah-sekolah rendah Eropa, yang merupakan prasyarat wajib untuk memasuki OSVIA (*Opleidingschulen voor inlandsche ambtenaren*, “sekolah pelatihan untuk para pejabat pribumi”) dan STOVIA (*School tot opleiding van inlandsche arsten*, “sekolah untuk pelatihan dokter-dokter pribumi”), terbuka untuk orang-orang Indonesia (Ricklefs, 2005: 330). Situasi ini sungguh menguntungkan Kartini. Ia termasuk dalam generasi pertama pribumi terdidik.³ Keberuntungan Kartini masih berlanjut. Meskipun ia harus menjadi isteri ketiga Bupati Rembang, R.M.A.A. Singgih Djajadiningrat, sang suami merupakan seorang bupati yang berpikiran maju (Ricklefs, 2005: 331) sehingga memberi keleluasaan kepada Kartini untuk terus belajar dan menulis.

Melengkapi peran kunci Kartini dalam keberanian memperjuangkan emansipasi wanita, mendobrak kekolotan adat, dan menyerang kolonialisme, dan pilihan berjuang dengan tulisan menempatkan Sang Putri Sejati sebagai pemimpin wacana (*discursive leader*). Inti kepemimpinan wacana (*discursive leadership*) ialah proses memengaruhi dan mengelola makna melalui ucapan atau tulisan (bdk. Fairhurst, 2007: 8). Surat-surat Kartini memiliki daya kekuatan untuk menggerakkan para pembacanya.

3.2 Inspirasi dari Surat-surat Kartini

Surat-surat Kartini, termasuk yang dihimpun dalam buku *Surat-surat Kartini: Renungan tentang dan untuk Bangsaanya*, sungguh kaya inspirasi, terutama dalam tujuh hal berikut ini.

Pertama, visi kebangsaan. Kartini memang dikenal sebagai pejuang emansipasi wanita. Ia berusaha mendobrak kekolotan adat (dan agama) yang memasung hak asasi kaum hawa. Namun, lebih dari itu, puteri bupati ini juga memprihatinkan kepahitan hidup bangsaanya. Dalam berbagai suratnya, Kartini menunjukkan kepedulian itu sekaligus visi (pandangan luas dan jauh ke depan) tentang sebuah keadaan adil, makmur, dan merdeka yang ia sebut “Jawa Baru” atau “Jawa masa depan”. Kartini bahkan meyakini keadaan itu sebagai takdir meskipun memerlukan waktu yang lama:

“Perubahan di seluruh dunia Bumiputera kami akan terjadi; titik baliknya sudah ditakdirkan. Tetapi kapan? Inilah masalahnya. Kita tidak dapat mempercepat jam revolusi. Mengapa justru kami di rimba ini, di dalam daerah pedalaman yang jauh, di ujung negeri, mempunyai pikiran memberontak demikian! Teman-teman saya di sini berkata, bahwa lebih bijaksana bagi kami jika kami tunggu dulu 100 tahun lamanya — kalau kami bangun kembali, maka saat itulah waktu yang baik untuk kami Jawa sudah sampai sejauh yang kami inginkan” (*Surat-surat Kartini: Renungan tentang dan untuk Bangsaanya*, 1979: 17)

Visi kebangsaan Kartini terekam jelas dalam “Nota R.A. Kartini kepada Pemerintah: Lampiran Surat Permohonan Tertanggal 19 April 1903” (*Surat-surat Kartini: Renungan tentang dan untuk Bangsaanya*, 1979: 386-397). Nota itu merupakan lampiran permohonan Kartini kepada pemerintah kolonial untuk melanjutkan bersekolah di Batavia, bahkan di Eropa. Isinya sangat visioner sebab memuat pemikiran-pemikiran besar Kartini untuk mengembangkan pendidikan dan memajukan penduduk di Jawa. Permohonan Kartini sebenarnya disetujui pemerintah kolonial, tetapi Kartini cukup tahu diri sehingga mengurungkan niatnya.

Kedua, vitalnya pendidikan. Ihwal sangat pentingnya pendidikan merupakan topik utama surat-surat Kartini. Ia begitu yakin bahwa satu-satunya cara mengangkat martabat kaum perempuan dan bangsanya adalah dengan pendidikan. Cita-cita itu baru sebagian kecil terwujud hingga ajal merenggut, 17 September 1904, empat hari setelah melahirkan putra semata wayangnya, R.M. Soesalit. Politik etis dan keterlibatan keluarga van Deventer membantu terwujudnya mimpi Kartini. Pada 1912 didirikan sekolah khusus untuk perempuan oleh Yayasan Kartini di Semarang, dan menyusul di Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon dan beberapa daerah lainnya. Sekolah-sekolah itu dinamai “Kartinischool” (“Sekolah Kartini”).

Perjuangan Kartini berfokus utama pada pendidikan kaum perempuan. Pilihan itu bukan tanpa dasar, tetapi dilandasi argumentasi yang sungguh masuk akal. Bagi Kartini, kecerdasan pikiran dan pertumbuhan budi harus sama-sama dimajukan di kalangan perempuan sebab kaum ibu memiliki peran sentral dan strategis sebagai pendidik:

“Bila orang hendak sungguh-sungguh memajukan peradaban, maka kecerdasan pikiran dan pertumbuhan budi harus sama-sama dimajukan.

Dan siapa yang dapat paling banyak berbuat untuk yang terakhir ini, yang paling banyak membantu mempertinggi kadar budi manusia? Perempuan, ibu. Karena yang pertama-tama di pangkuan perempuanlah manusia menerima didikannya. Di sana anak mula-mula belajar merasa, berpikir, berbicara. Dan didikan yang pertama kali itu bukan tanpa arti bagi seluruh penghidupan” (*Surat-surat Kartini: Renungan tentang dan untuk Bangsaanya*, 1979: 40)

Agar mampu mencerdaskan kaum perempuan, Kartini bermimpi menjadi guru bagi kaumnya. Ia ingin pergi ke Eropa bersama dua adik perempuannya (Roekmini dan Kardinah) untuk belajar dan membekali diri.

“.... Roekmini akan belajar seni rupa agar kelak dapat mencurahkan tenaganya untuk menghidupkan lagi seni Hindia, salah satu jalan menuju ke kemakmuran rakyat. Si Kecil akan menempuh sekolah rumah tangga, supaya di kemudian hari dapat mengajarkan kepada calon ibu serta ibu rumah tangga harga uang dan sifat hemat; suatu kebajikan yang perlu benar dipelajari oleh rakyat Jawa yang suka akan kementerian, gila akan pujian, tak tahu derita. Dan saya akan belajar di bidang pengajaran, agar dapat mengajarkan kepada calon-calon ibu di samping ilmu pengetahuan, juga pengertian kasih dan keadilan seperti yang kami ketahui dari orang-orang Eropah” (*Surat-surat Kartini: Renungan tentang dan untuk Bangsaanya*, 1979: 39)

Dalam lingkup yang lebih luas, kesadaran Kartini mengenai vitalnya pendidikan didasari pemikiran bahwa pendidikan akan membangun pengetahuan, dan pengetahuan menjadi modal penting untuk meningkatkan martabat dan daya tawar dalam relasi kekuasaan. Pemikiran itu sejalan dengan gagasan kritis Francis Bacon (1597) ataupun Michael Foucault (1980) tentang pengetahuan sebagai kekuatan atau kekuasaan (*knowledge is power*). Sekadar bukti, Kartini menulis:

“Oh, sekarang saya mengerti, mengapa orang tidak setuju dengan kemajuan orang Jawa. Kalau orang Jawa berpengetahuan, ia tidak akan lagi mengiakan dan

mengamini saja segala sesuatu yang ingin dikatakan atau diwajibkan kepadanya oleh atasannya” (Surat-surat Kartini: Renungan tentang dan untuk Bangsaanya, 1979: 37)

Ketiga, pentingnya membaca dan menulis. Kartini menyadari inti belajar adalah membaca dan menulis. Sampai usia 12 tahun, ia masih dibolehkan sekolah hingga tingkat ELS (Europese Lagereschool). Namun, Kartini tidak diizinkan melaju ke HBS (Hogere Burgeschool). Meskipun demikian, ia tidak patah semangat. Ia lalu belajar secara otodidak dengan terus membaca dan menulis. Surat kabar, majalah, dan buku-buku terutama berbahasa Belanda tentang sastra, sejarah, pengetahuan umum, dan gerakan perempuan dilahapnya.

Selain membaca surat kabar berbahasa Belanda terbitan Semarang *De Locomotief*, ia juga berlangganan majalah wanita terbitan Belanda *De Hollandsche Lelie*. Beberapa buku yang dibaca Kartini sebelum berumur 20 tahun misalnya *Max Havelaar* dan *Minnebreiven* (Surat-surat Cinta) karya Multatuli, *De Stille Kraacht* (Kekuatan Gaib) karya Louis Coperus, *Moderne Vrouwen* (Wanita-wanita Modern) karya Hilda van Sulyenburg, *Die Waffen Nieder* (Letakkan Senjata) karya Berta Von Suttner, juga buah-buah karya Van Eeden, Augusta de Witt, dan Ny. Goekoop de-Jong Van Beek. Dari surat-surat yang dituliskannya, tampak bahwa Kartini merupakan seorang pembaca yang cermat. Terbukti ia menyebut salah satu karangan atau mengutip beberapa kalimat. Dalam hal menulis, Kartini memang piawai. Bahasanya lancar dan penuh gaya. Tidak mengherankan jika beberapa karangan Kartini yang dikirim ke redaksi *De Hollandsche Lelie* dimuat di majalah itu. Ia pun menyadari perjuangan dapat dilakukan dengan tulisan: “Rampaslah semua harta milik saya, asal jangan pena saya” (Sutrisno, 1979: xvii).

Keempat, sikap kritis dan berani. Kartini bersemboyan “yang tidak berani, tidak menang.” Ia pun menulis, “Orang-orang yang berani menguasai tiga perempat dunia” (*Surat-surat Kartini: Renungan tentang dan untuk Bangsaanya*, 1979: 15). Surat-surat Kartini banyak memuat otokritik kepada bangsaanya sendiri yang ia sebut bodoh, tiada berpengetahuan, terbelakang, malas, minder, gila sanjungan, tinggi hati, dsb. Namun, tidak hanya mengkritik, Kartini pun menawarkan penyelesaiannya yang — lagi-lagi — melalui pendidikan, yakni pendidikan akhlak:

“Salah satu sifat orang Jawa yang tidak baik, yang kalau perlu harus dibasmi ialah sifat gila sanjungan. Hal itu akan banyak membantu memakmurkan Jawa dan kami hanya dapat mencapainya melalui pendidikan akhlak.

Alangkah banyaknya tenaga yang tak terpakai yang seharusnya berguna dan membawa rahmat bagi nusa dan bangsa. Ini disebabkan karena yang empunya tenaga itu tinggi hati dan tidak menggunakannya. Orang bangsawan lebih suka menanggung papa dan sengsara daripada hidup baik, tetapi harus bekerja tanpa payung keemasan yang melindungi kepalanya yang bangsawan itu. Orang bangsawan menganggap hina segala sesuatu yang tidak ditudungi oleh barang yang sangat diinginkannya, yakni payung keemasan!” (*Surat-surat Kartini: Renungan tentang dan untuk Bangsaanya*, 1979: 40)

Kartini pun bahkan berani mengkritik pemerintah kolonial Belanda secara lugas dan tajam (bdk. Siregar, 1964: 22). Banyak kebijakan pemerintah kolonial yang menjadi sasaran kritik Kartini, antara lain kebijakan dalam pendidikan. Menurut Kartini, pemerintah telah

menciptakan dan melanggengkan kelas-kelas sosial lewat persekolahan.

“... Apa yang dilakukan Pemerintah untuk kemajuan rakyat? Untuk anak-anak bangsawan Bumiputera ada yang disebut sekolah kepala-kepala, sekolah guru dan sekolah dokter Jawa; dan untuk umum berbagai sekolah Bumiputera, satu dalam tiap distrik. Tetapi Pemerintah membagi perguruan-perguruan yang terakhir ini dalam dua kelas. Di sekolah-sekolah pertama, yang hanya ditempatkan di setiap ibu kota sebelah barat, diajarkan mata pelajaran yang sama seperti sebelum pemisahan; tetapi di sekolah-sekolah kedua, anak-anak sekarang hanya belajar bahasa Jawa (membaca dan menulis) dan berhitung sedikit. Di sisi lain tidak boleh diajarkan bahasa Melayu seperti dulu, apa sebabnya kurang jelas bagi saya. Saya kira pemerintah berpendapat, bahwa jika rakyat belajar, mereka tidak mau lagi mengerjakan tanah” (*Surat-surat Kartini*, 1979: 29-30)

Kartini berani pula mengkritik kebijakan perombakan struktur Pemerintahan Dalam Negeri yang berbuntut pada pengurangan pegawai pribumi. Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang dalam surat Kartini disebut “Y.M.” (Yang Mulia) pun disentilnya:

“Saya tahu kesukaran kepala-kepala Bumiputera: saya tahu suka duka rakyat. Dan apa yang akan dibuat Pemerintah sekarang? Pemerintah akan merombak susunan Pemerintahan Dalam Negeri. Pegawai Bumiputera akan sangat dikurangi, hal yang menguntungkan pegawai-pegawai Eropah. Karena penyusutan itu, tiap tahun akan dihemat f. 164.800,- dan penghematan ini menguntungkan pegawai-pegawai Pemerintah Dalam Negeri bangsa Eropah. Gaji para pegawai ini sungguh dianaktirikan dibandingkan dengan pegawai-pegawai lainnya. Tetapi haruskah Pemerintah memperbaiki kesalahannya dengan merugikan golongan pegawai Bumiputera? ... Hampir semua Residen menentang usul-usul ini, tetapi Y.M. memang berkehendak demikian dan meski semua menentang hal itu, perombakan tetap akan diteruskan ...” (*Surat-surat Kartini: Renungan tentang dan untuk Bangsaanya*, 1979: 29)

Sikap kritis dan berani telah mendorong Kartini menulis berbagai kebobrokan kebijakan pemerintah, misalnya pajak yang tinggi, rendahnya gaji, diskriminasi terhadap pegawai pribumi, buruknya irigasi, diizinkan jua-beli ganja beserta kerakusan pemerintah menarik cukai ganja — yang disebut Kartini sebagai “penyakit sampar bagi bangsa Jawa”. Dalam sikap kritis dan berani itu, mencuat kuat keberpihakan Kartini kepada bangsanya. Ia menyatakan keberpihakan sekaligus kritik keras-tajam kepada (orang-orang) Belanda, umpamanya:

“... sejumlah orang Belanda mengumpat-umpat Hindia sebagai ‘negeri kera yang brengsek.’ Saya dapat menjadi marah sekali kalau saya mendengar orang mengatakan: ‘Hindia brengsek.’ Orang sering lupa bahwa ‘negeri kera yang brengsek’ itu telah mengisi beberapa saku kosong dengan emas, kalau mereka pulang ke tanah air setelah tinggal di sini beberapa tahun” (*Surat-surat Kartini: Renungan tentang dan untuk Bangsaanya*, 1979: 17)

Kelima, kesederhanaan dan kerendahatian. Sebagai bagian dari kelompok bangsawan, Kartini tidak mentang-mentang dan membuat jarak dengan rakyat kecil. Ia hidup (relatif) sederhana, rendah hati, dan memihak rakyat. Kerendahan hati terungkap, antara lain, lewat keinginannya dipanggil Kartini tanpa embel-embel “Raden Ajeng” (sebagai puteri

bupati Jepara) atau “Raden Ayu” (sebagai isteri bupati Rembang). Keinginan itu terungkap dalam berbagai suratnya dan dijadikan judul biografi *Panggil Aku Kartini Saja* yang ditulis Pramoedya Ananta Toer (1962). Alih-alih mengagungkan diri sebagai bangsawan, Kartini justru sering memprihatinkan perilaku para bangsawan yang tuna-jiwa dan tuna-budi. Kepada Stella Zeehandelaar, Kartini menulis:

“... seperti kamu katakan bahwa saya ‘keturunan bangsawan’. Apakah saya seorang anak raja? Bukan, seperti kamu juga bukan. Raja terakhir dalam keluarga kami, yang langsung menurunkan kami menurut garis keturunan laki-laki, saya kira sudah berlalu 25 keturunan jauhnya. Ibu masih bersaudara dekat dengan keluarga raja Madura. Moyangnya, raja yang bertakhta dan neneknya ratu mahkota.

Tapi hal itu semua tidak kami pedulikan. Bagi saya hanya ada dua macam kebangsawanan: bangsawan jiwa dan bangsawan budi. Pada pikiran saya tidak ada yang lebih gila, lebih bodoh daripada melihat orang-orang yang membanggakan apa yang disebut ‘keturunan bangsawan’ itu” (*Surat-surat Kartini: Renungan tentang dan untuk Bangsaanya*, 1979: 9)

Keenam, keselarasan dalam keluarga. Kartini memang diakui sebagai pemikir dan penggerak feminisme. Namun, jika ditilik dengan kacamata Feminisme Radikal,⁴ pemikiran dan perjuangan Kartini boleh jadi akan dicemooh. Ia bersemangat mengajak kaum perempuan mewujudkan emansipasi—termasuk dan terutama menolak poligami—tetapi akhirnya ia tidak berdaya menerima pinangan Bupati Rembang R.M.A.A. Singgih Djajadiningrat yang sudah beristeri dan beranak enam.

Keputusan Kartini menerima pinangan bukan tanpa pergumulan nalar dan hati. Ia sadar penuh bahwa cemooh dan cibiran akan datang menimpanya. Namun, ia mengambil jalan “keselarasan” dengan tetap memegang prinsip dan memiliki posisi tawar. Kartini minta agar ia tetap diizinkan membaca, menulis, dan berkorespondensi dengan sahabat-sahabatnya di Eropa. Bahkan Kartini menggunakan fasilitas suami (baca: keluarga) — yang oleh Feminisme Radikal disebut “lembaga utama sistem patriarki” (Budiman, 1981: 43) — untuk mewujudkan cita-citanya. Bagi Kartini, “kebahagiaan perempuan yang paling tinggi, sejak berabad-abad yang lalu bahkan juga sampai saat ini adalah hidup selaras bersama-sama dengan laki-laki. Dengan bantuan penuh dari suaminya, Kartini dapat mulai bergerak bebas mewujudkan cita-citanya” (Sutrisno, 1979: xvi).⁵ Bagaimana pun, perempuan dicitrakan sebagai makhluk individu yang beraspek keluarga (Sugihastuti, 2000: 46). Sebagai konsekuensi, perempuan perlu membangun dialektika autentik dengan pasangannya agar “pembagian kerja secara seksual” dalam rumah tangga berjalan harmonis dan menguntungkan semua pihak.⁶

Ketujuh, kepercayaan diri membangun relasi. Kartini memang anak dan isteri bupati sehingga memiliki kelebihan akses dibandingkan perempuan pada umumnya. Namun, tidak semua perempuan bangsawan memiliki kepercayaan diri membangun relasi, terutama dengan orang-orang Eropa. Kartini bersahabat lewat surat dengan Mr. J.H. Abendanon (Direktur Kementerian Pengajaran dan Kerajinan) dan isterinya, Stella Zeehandelaar (perempuan Belanda lima tahun lebih tua dari Kartini yang dikenalnya lewat majalah *De Hollandse Lelie*), Ir. H.H. van Kol (insinyur yang bertugas membangun pengairan di Hindia Belanda) dan isterinya, Ny. M.C.E. Ovink-Soer (isteri Asisten-Residen Ovink di Jepara), Dr. N. Adriani (ahli bahasa dan budaya, penulis buku *De Bare'e sprekende Toradja's van Midden-Celebes*), Ny. H.G. de Booy-Boisservain (anak perempuan sastrawan terkenal dan pemimpin redaksi harian *Algemeen Handelsblad*, Charles Boisservain), dan Prof. Dr. G.K.

Anton (guru besar Ilmu-ilmu Kenegaraan di Yena, Jerman). Kepercayaan diri Kartini dalam membangun relasi dengan sahabat-sahabat Eropanya tentu berkat pengetahuan yang diperolehnya melalui bangku sekolah ataupun secara otodidak lewat membaca. Jika hidup di zaman sekarang, Kartini adalah sosok yang mampu memasuki pergaulan internasional atau mengglobal.

4. Penutup

Kepahlawanan Kartini terletak pada peran kunci yang dijalankan dalam hidupnya yang singkat dan inspirasi yang ditebarkan melalui surat-suratnya. Peran kunci Kartini adalah pada zamannya ia telah berani memperjuangkan emansipasi wanita, mendobrak kekolotan adat, dan menyerang kolonialisme. Peran kunci itu memang tidak dilakukan dengan menembakkan senjata, tetapi dengan tulisan. Perjuangan dengan tulisan didasari pengetahuan dan keterdidikan Kartini yang membuatnya menonjol dan “tampak beda” dibandingkan perempuan sezamannya. Melalui surat-suratnya, Kartini mewujudkan kepemimpinan wacana (*discursive leadership*).

Surat-suratnya Kartini yang analitis dan menyentuh menyodorkan tujuh inspirasi: (1) visi kebangsaan, (2) vitalnya pendidikan, (3) pentingnya membaca dan menulis, (4) sikap kritis dan berani, (5) kesederhanaan dan kerendahan hati, (6) keselarasan dalam keluarga, serta (7) kepercayaan diri membangun relasi. Inspirasi itu tidak hanya relevan bagi kaum hawa, tetapi juga bagi segenap warga bangsa Indonesia. Khusus bagi kaum perempuan, peran kunci dan inspirasi yang ditawarkan Kartini siap membawa mereka memenuhi ungkapan Perancis “*C’est la femme qui a fait l’histoire*”. Wanitalah yang menciptakan sejarah.

Catatan Akhir

1. Versi awal artikel ini berupa makalah berjudul “*C’est la femme qui a fait l’histoire*” yang dipaparkan dalam Sarasehan “Perempuan Urat Nadi Pendidikan Keluarga dan Bangsa” di Prodi Pendidikan Sejarah, FKIP, Universitas Kristen Satyawacana, Salatiga, Senin, 22 April 2013.
2. Gagasan tentang politik etis di Hindia Belanda berawal dari artikel C.Th. van Deventer, seorang ahli hukum yang pernah tinggal di Hindia Belanda selama 1880-1897, berjudul “*Een eereschuld*” (‘sebuah hutang kehormatan’) dalam jurnal yang terbit di Belanda *De Gids* (1899). Ia menyatakan bahwa negeri Belanda berutang kepada rakyat Hindia Belanda atas semua kekayaan yang diperas dari negeri mereka. Utang itu sebaiknya dibayarkan kembali dengan jalan memberi prioritas utama kepada kepentingan rakyat Hindia Belanda dalam kebijakan kolonial (Ricklefs, 2005: 320). Pemerintah kolonial berusaha membayar “utang kehormatan” kepada rakyat Hindia Belanda dengan menetapkan tiga ranah politik etis, yaitu pendidikan, pengairan, dan perpindahan penduduk (Ricklefs, 2005: 320). Penguasa pemerintah kolonial menyebut pelaksanaan politik etis sebagai (dalam bahasa Perancis) “*vocation civilisatrice*” atau “mengemban tugas mengadabkan” (lih. Lubis, 1987: xv).

Di balik politik etis, sesungguhnya Belanda menyimpan maksud terselubung untuk makin kuat mencengkeram Hindia Belanda. Lewat pendidikan, tercetak tenaga-tenaga terdidik untuk menjalankan roda birokrasi kolonial. Dengan pembangunan pengairan, produksi pertanian meningkat dan lebih menguntungkan. Melalui perpindahan

penduduk, tenaga kerja murah tersebar dari Jawa ke seluruh nusantara. Namun, bagi kaum bumiputera, politik etis tetap membuahkan hasil, terutama di ranah pendidikan, yaitu munculnya kesadaran kebangsaan sejak dekade pertama abad ke-20 yang selanjutnya melahirkan gerakan kemerdekaan.

- 3 Generasi pertama pribumi terdidik merupakan 36 orang lulusan pertama sekolah rendah Belanda (ELS) yang mampu melanjutkan ke HBS. Mereka antara lain Soewardi Soerjaningrat, Soetomo, Wahidin, dan Kartono (kakak Kartini) yang berasal dari keluarga bangsawan atau anak bupati. Adapun lulusan HBS pertama yang berhasil meraih gelar doktor di Universitas Leiden pada tahun 1913 adalah Hoesein Djajadiningrat (lahir 1886, jadi masih berusia 27 tahun) dengan disertasi tentang sejarah Banten (Ricklefs, 2005: 333). Pengakuan atas intelektualitas Kartini misalnya ketika ia diminta memberikan semacam rekomendasi bagi Agus Salim (1884-1954) untuk mendapatkan beasiswa studi di Belanda (lih. Ricklefs, 2005: 360).
- 4 Feminisme Radikal merupakan gerakan perempuan yang berjuang dalam realitas seksual untuk menghancurkan dominasi patriarki, bahkan memutuskan hubungan dengan laki-laki (lih. Budiman, 1981: 46). Perempuan harus memisahkan kehidupannya dari laki-laki — paling sedikit memisahkan perasaan — dengan cara mengembangkan kesanggupan untuk berdiri sendiri, termasuk dalam memperoleh kepuasan seksual. Dua gerakan feminisme lainnya ialah Feminisme Liberal (yang percaya bahwa emansipasi terjadi jika ada kesadaran kesetaraan pada laki-laki) dan Feminisme Sosialis (yang berorientasi pada kesetaraan sosial-ekonomi). Di manakah tempat gerakan Kartini? “Feminisme Kartini” agaknya memiliki ciri liberal sekaligus sosialis.
- 5 Selain berdasarkan “kontrak” yang disepakati bersama dengan (calon) suami, keputusan Kartini juga didasari pertimbangan hendak membahagiakan ayahnya. Dalam surat kepada Stella Zeehandelaar, 23 Agustus 1900, Kartini menumpahkan secara panjang-lebar pergulatan batinnya (lih. *Surat-surat Kartini: Renungan tentang dan untuk Bangsaanya*, 1979: 63-81),
- 6 Keselarasan perempuan dan laki-laki sebagai isteri-suami melahirkan konsep “orang tua” yang hidupnya mampu menjadi inspirasi bagi anak-anak dan generasi penerus. Kisah nyata tentang inspirasi orang tua dari sejumlah tokoh sukses disunting oleh Wardaya (2011).

Daftar Pustaka

- Baryadi, I. Praptomo. 2002. *Dasar-dasar Analisis Wacana dalam Ilmu Bahasa*. Yogyakarta: Pustaka Gondho Suli.
- Budiman, Arief. 1981. *Pembagian Kerja secara Seksual: Sebuah Pembahasan Sosiologis tentang Peran Wanita di dalam Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Fairhurst, Gail T. 2007. *Discursive Leadership: In Conversation with Leadership Psychology*. London: Sage Publication.
- Lubis, Mochtar. 1987. “Kata Pengantar”. Dalam H. Baudet dan I.J. Brugmans (eds.). 1987. *Politik Etis dan Revolusi Kemerdekaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm. vii-xxvii.
- Ricklefs, M.C. 2005. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Diterjemahkan dari *A History of Modern Indonesia since Century 1200* oleh Satrio Wahono, dkk. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Siregar, Bakri. 1964. *Sedjarah Sastera Indonesia Modern*. Djakarta: Akademi Sastera dan Bahasa “Multatuli”.
- Sugihastuti. 2000. *Wanita di Mata Wanita: Perspektif Sajak-sajak Toety Heraty*. Bandung: Nuansa.
- Sutrisno, Sulastin. 1979. “Kata Pengantar”. Dalam *Surat-surat Kartini: Renungan tentang dan untuk Bangsaanya*. Jakarta: Djambatan, hlm. viii-xviii.
- Surat-surat Kartini: Renungan tentang dan untuk Bangsaanya*. 1979. Diterjemahkan dari *Door Duisternis tot Licht* oleh Sulastin Sutrisno. Jakarta: Djambatan.
- Titscher, S.; M. Meyer; R. Wodak; dan E. Vetter. 2000. *Methods of Text and Discourse Analysis*. London: SAGE Publications.
- van Dijk, T.A. 2003. “The Discourse-Knowledge Interface”. Dalam G. Weiss dan R. Wodak (eds.). 2003. *Critical Discourse Analysis: Theory and Interdisciplinarity*. New York: Palgrave Macmillan, hal. 85-109.
- _____. 2005. “Contextual Knowledge Management in Discourse Production: A CDA Perspective”. Dalam R. Wodak dan P. Chilton (eds.). 2005. *A New Agenda in (Critical) Discourse Analysis*. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, hal. 71-100.
- _____. 2006. “Multidisciplinary CDA: A Plea for Diversity”. Dalam R. Wodak dan M. Meyer (eds.). 2006. *Methods of Critical Discourse Analysis*. London: Sage, hlm. 95-120.
- Wardaya, Baskara T., ed. 2011. *Berkah Kehidupan: 32 Kisah Inspiratif tentang Orangtua*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.